

**DIKSI DAN GAYA BAHASA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014–2019**
***DICTION AND STYLE OF LANGUAGE BY THE LEGISLATURE OF THE
REPUBLIC INDONESIA 2014–2019 PERIOD***

Nency Ugi Lestari, Bambang Wibisono, Andang Subaharianto
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37 Jember 68121 Telp/Faks 0331-337422
Email: cye.leiz@gmail.com, 085655995497

Abstrak

Bahasa politik adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk dan demi kepentingan kekuasaan. Pembicaraan tentang politik adalah pembicaraan tentang kekuasaan, pengaruh, dan otoritas. Politisi menggunakan bahasa bukan hanya untuk menyatakan pendapat, melainkan juga untuk menyembunyikan pikiran, intervensi, provokasi, dan sebagainya. Bahasa dan kekuasaan merupakan dua aspek yang berkaitan. Seseorang menggunakan bahasa untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, orang yang memiliki kekuasaan juga dapat mempengaruhi bahasa. Dengan nama kuasa, dengan mudah seseorang yang memiliki kekuasaan mempengaruhi massa untuk mengikuti dan menggunakan bahasa tersebut. Sidang Paripura anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang seterusnya disingkat DPR RI) merupakan salah satu objek yang tepat untuk mengetahui bahasa politik Indonesia, dengan meneliti diksi dan gaya bahasa yang digunakan. Data penelitian berupa tuturan yang dikemukakan oleh anggota dewan pada saat Sidang Paripurna. Analisis data menggunakan metode padan dengan pendekatan konstektual. Selanjutnya, diperkuat dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (yang seterusnya disingkat AWK). Hasil penelitian menunjukkan diksi yang digunakan anggota dewan dalam Sidang Paripurna, meliputi pilihan kata yang bermakna denotatif, konotatif, polisemi dan sinonimi. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa eufemisme, erotesis, koreksi, oksimoron, resmi, klimaks, repetisi, personifikasi, dan sindiran. Anggota DPR sering saling tuduh dan saling tuding dengan menggunakan gaya bahasa sindiran, untuk maksud mementingkan kepentingan individu dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Mereka berusaha menyembunyikan kepentingan politik dengan gaya bahasa eufemisme. Anggota dewan atau fraksi yang memiliki kekuasaan tertinggi akan mendominasi keputusan.

Kata Kunci: bahasa politik, anggota dewan, analisis wacana kritis, diksi, gaya bahasa.

Abstract

Politic language is a language that is used by a group of people for the sake of power. Talk of politic means that it talks about the power, influence, and authority. A Politicians use a language is not only to express their opinion, but it also for hiding view, intervention, provocation, and so forth. Language and power have a correlation. Someone use language is to get a power. However, someone who has power can influence the language. By the name of power, someone with his power influences the mass to follow and use the language. A Paripurna Session of council is an objectfor knowing the language of Indonesian politicians, by analyzing the diction and language stylethat are used. The data of research is a discourse that is used by the council in Paripurna Session. Data analysis uses equal method with contextual approach. Then, it is consolidated by using Critical Discourse Analysis (CDA). The result of the research shows that the diction that is used by the councilin Paripurna Session includesdenotative meaning, connotative meaning, polysemy, and synonymy. The language stylethat are used by the councilis euphemism, erotecyst, correction,

oxymoron, formal, climax, repetition, personification, and satire. The members of Indonesia Council often accuse each other by using satire language, for the purpose of self-importance by the name of society. They try to hide the politic importance by using euphemism. The members or a faction who have the highest power will dominate the decision.

Key-words: politic language, Council's members, critical discourse analysis, diction, language style.

Pendahuluan

Dalam ranah politik, bahasa sebagai media untuk komunikasi, untuk meraih kekuasaan, dan sebagai alat serta pelindung kekuasaan. Tidak jarang bahasa digunakan untuk memanipulasi suatu kebenaran/kenyataan, memaksa, mengubah suatu persepsi orang terhadap suatu isu-isu melalui komunikasi. Terkadang masyarakat juga tidak mengetahui maksud sebenarnya dari bahasa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh ahli komunikasi bahwa makna bahasa sangat subjektif dan tidak pernah tunggal “*word do not mean what people mean*” (Walfajri, 2011: 3). Makna yang dipahami masyarakat belum tentu makna yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penutur. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Aristoteles (dalam Cangara, 2011: 14) komunikasi menekankan “siapa mengatakan apa kepada siapa”. Komunikasi menekankan siapa yang berbicara, mengenai apa penutur berbicara, dan kepada siapa penutur berbicara.

Secara klasik komunikasi memiliki fungsi untuk memberi informasi, menghibur, mendidik, dan membentuk opini publik (Cangara, 2011: 20). Membentuk opini publik adalah fungsi komunikasi yang sangat dimanfaatkan dalam dunia politik. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah politik, segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan seringkali di atas namakan dengan label politik (Cangara, 2011: 22).

Para politisi harus pintar menggunakan bahasa yang persuasif dan propaganda agar masyarakat tersentuh oleh ucapannya. Program persuasif bertujuan mengubah opini masyarakat

dengan memberi informasi yang membujuk anggota sasaran sehingga berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator (Iriantara dan Malik, 1994: 99). Sama halnya dengan persuasif, propaganda merupakan alat ampuh yang memungkinkan keberhasilan dengan mempengaruhi massa atau meraih kekuasaan (Shoelhi, 2012: 73). Pada penggunaan propaganda, para politisi berusaha menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat, tidak hanya untuk mengarahkan pada opini publik melainkan juga untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui bahasa politik tersebut, dengan cara meneliti diksi dan gaya bahasa yang digunakan. Oleh sebab itu, penggunaan diksi dan gaya bahasa para anggota dewan perlu diteliti untuk mengetahui bahasa politik Indonesia.

Dalam penelitian ini banyak bahasa yang digunakan anggota dewan untuk memanipulasi suatu keadaan yang sebenarnya. Banyak pula bahasa politik yang digunakan untuk melindungi suatu kepentingannya sendiri. Untuk tujuan seperti itu, para anggota dewan menggunakan gaya bahasa yang beragam. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian mengenai gaya bahasa agar mengetahui gaya bahasa apa saja yang digunakan oleh para anggota dewan tersebut dan mengetahui maksud sebenarnya dilihat dari gaya bahasa yang digunakannya. Selain itu, peneliti juga mengkaji diksi (pilihan kata). Di dalam diksi, terdapat satu kesesuaian diksi yaitu suatu cara penulis atau pembicara memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dia berbicara,

dengan siapa, dan pada saat apa dia berbicara (Keraf, 1996: 24). Hal ini perlu diteliti untuk mengetahui makna, maksud, dan tujuan dari penggunaan diksi tersebut. Selain itu, agar masyarakat mengetahui maksud yang sebenarnya dari anggota dewan dilihat dari bahasanya. Agar tidak mudah terpengaruh propaganda-propaganda politik.

Objek kajian dari penelitian ini adalah Anggota DPR RI. DPR RI adalah pusat pemerintahan RI selain Presiden RI yang ada di Indonesia. DPR RI merupakan objek kajian yang tepat, karena DPR RI sudah mewakili semua latar belakang politik yang ada di Indonesia. Dari semua rapat yang dilakukan oleh DPR RI, peneliti mengambil objek pada saat Sidang Paripurna karena Sidang Paripurna merupakan rapat tertinggi dan dihadiri oleh semua anggota DPR RI serta rapat pengambilan keputusan tingkat II. Hal tersebut menandakan bahwa keputusan atau kebijakan terakhir diputuskan pada saat Sidang Paripurna. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji adalah (1) diksi yang digunakan oleh para anggota DPR RI dalam ranah persidangan; (2) gaya bahasa yang digunakan oleh para anggota DPR RI dalam ranah persidangan; (3) maksud dan tujuan penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh para anggota DPR RI dalam ranah persidangan dari sudut pandang AWK.

Metodologi Penelitian

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu berupa tuturan yang dikemukakan oleh anggota dewan pada saat Sidang Paripurna DPR RI berlangsung. Khusus untuk permasalahan pertama dan kedua, data yang diperlukan adalah tuturan yang menunjukkan adanya diksi dan gaya bahasa yang dituturkan oleh anggota DPR RI tersebut. Untuk permasalahan ketiga, selain tuturan yang menunjukkan adanya diksi dan gaya bahasa, diperlukan data latar belakang dari penutur tersebut meliputi jenis kelamin, fraksi, jabatan/kelas sosial, etnis, umur, pendidikan dan sebagainya.

Data dalam penelitian ini bersumber dari

internet (youtube) yaitu berupa video Sidang Paripurna DPR RI pada masa sidang I dan II. Masa sidang I berlangsung dari bulan Oktober–Desember 2014 dan masa sidang II berlangsung dari bulan Januari–Februari 2015 pada tahun sidang 2014/2015. Jumlah video rekaman Sidang Paripurna terdapat 4 video, yaitu dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji atau pelantikan anggota DPR RI periode 2014–2019, pemilihan Pimpinan DPR RI, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (yang seterusnya disingkat AKD), dan penetapan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (yang seterusnya disingkat Kapolri) serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (yang seterusnya disingkat KPK).

Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode simak dilakukan dengan cara menyimak video Sidang Paripurna tersebut. Dalam tahap penyediaan data peneliti mengunduh video Sidang Paripurna DPR RI melalui *youtube* yang diunggah oleh stasiun televisi yang menyiarkan sidang tersebut dan TV Parlemen. Selanjutnya, menggunakan teknik simak bebas libat cakap, artinya peneliti hanya menyimak video tersebut dan tidak ikut serta dalam dialog objek yang ditelitinya. Teknik lanjutan yang terakhir adalah teknik catat. Dalam teknik ini penulis mencatat dengan cara mentranskripsi secara ortografis yang sesuai dengan yang dibicarakan dalam Sidang Paripurna tersebut.

Metode yang digunakan peneliti pada tahap analisis data adalah metode deskriptif dan metode padan dengan pendekatan kontekstual serta didukung oleh AWK. Metode diskriptif yaitu peneliti menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada secara empiris. Metode diskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua yaitu mengenai diksi dan gaya bahasa yang digunakan anggota dewan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Sudaryanto (1993: 3) menyatakan metode padan merupakan metode yang tidak hanya melihat bahasanya, namun juga melihat unsur-unsur pembentuknya. Dalam penelitian ini analisis

data yang digunakan untuk permasalahan ketiga adalah metode padan dengan pendekatan kontekstual. Selanjutnya, diperkuat dengan menggunakan AWK. Dengan menggunakan AWK, bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata-mata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks (Eriyanto, 2003: 7). Berdasarkan pendekatan yang diungkapkan oleh Teun A. Van Dijk, Fairclough dan Wodak (dalam Eriyanto, 2003: 8-14) AWK terdiri atas lima karakteristik yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Karakteristik inilah yang akan digunakan sebagai salah satu dasar teori untuk mencari konteks atau latar belakang penutur. Selain itu, didukung pula dengan teori yang dikemukakan oleh Foucault (dalam Eriyanto, 2003: 19) bahwa wacana berperan untuk mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Kemudian, model analisis wacana yang digunakan adalah model analisis kognisi sosial yang dikemukakan oleh Teun Van Dijk. Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2003: 222), wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata. Van Dijk menggambarkan wacana dengan menggunakan tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari suatu wacana tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan ini menjelaskan pemakaian diksi dan gaya bahasa. Agar lebih dipahami akan diberikan satu contoh penggunaan diksi dan gaya serta maksud dan tujuan dilihat dari satu sidang secara keseluruhan.

1.1 Diksi (Pilihan Kata)

1.1.1 Diksi Denotatif

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Iya sebentar sebentar pertanyaannya adalah dengarkan karena

kita masih punya beberapa agenda dimana sebetulnya kalau menurut aturan jumlah anggota memang sudah kuorum sudah lebih dari setengah lebih 1 menurut aturan. Cuma karena ada 2 fraksi bukan fraksi maaf salah partai belum hadir makanya tadi kan kita mengambil keputusan cara dengan diperpanjang sorry di skors 30 menit. Kan begitu, ini ini kan semua sudah setuju. Skors sudah saya cabut untuk melanjutkan agenda dalam Sidang Paripurna ini. Nah jadi tentu harus dengan persetujuan anggota yang terhormat harus ada persetujuan apakah ini mau diperpanjang sampai selesai” (Anggota ada yang ingin lanjut dan ada yang ingin skors)

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat empat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *agenda*, *kuorum*, *fraksi*, dan *skors*. Berdasarkan KBBI *agenda* memiliki arti tema yang dibicarakan dalam rapat politik. Kata *agenda* sudah dibakukan dalam KBBI bahwa kata *agenda* memiliki makna tersendiri dalam ranah politik yaitu tema yang dibicarakan, bukan lagi suatu catatan ataupun acara. *Agenda* merupakan diksi denotatif karena kata *agenda* tidak memiliki makna lain selain makna tema dalam konteks tersebut. Selanjutnya, pada kata *kuorum*, *kuorum* merupakan akronim dari *kuota forum*. Akronim *kuorum* ini biasa digunakan untuk menunjukkan berapa banyak yang hadir dalam rapat. *Kuorum* dalam Sidang Paripurna dapat diselenggarakan apabila memenuhi setengah dari anggota DPR RI ditambah satu dan apabila jumlah kurang dari ketentuan maka rapat belum bisa dilaksanakan. Akronim *kuorum* ini apabila dijelaskan per kata yaitu *kuota* memiliki arti jumlah yang sudah ditentukan, sedangkan *forum* merupakan lembaga atau badan. Jadi akronim *kuorum* memiliki makna yang sama dari referennya dan tidak memiliki makna ganda.

Fraksi sebenarnya sudah ada dalam KBBI yaitu memiliki arti kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa

anggota yang sepeham dan sependirian. Kata *fraksi* hampir sama dengan penggunaan kata *partai*, namun kata *fraksi* digunakan sebagai nama partai setelah partai tersebut menjadi anggota DPR RI yang sah. Selain itu, *fraksi* dapat terdiri atas lebih dari dua partai. Selanjutnya, kata *skors* berdasarkan KBBI memiliki arti menghentikan sementara waktu. Kata *skors* biasanya diimbui dengan akhiran {-ing} dalam penggunaannya, yaitu menjadi *skorsing*. Diksi *skors* dalam persidangan DPR RI digunakan untuk menghentikan rapat sementara. Penentuan *skors* biasanya berdasarkan kesepakatan forum. Namun, dalam Tata Tertib (yang seterusnya disingkat Tatib) DPR waktu paling lama untuk *skors* adalah 30 menit. *Skors* merupakan istilah politik yang biasa diartikan penundaan rapat. Kata *skors* merupakan diksi denotatif karena dalam pemakaian kata *skors* dalam persidangan ini tidak menimbulkan makna ganda.

1.1.2 Diksi Konotatif

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri atas, PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Fraksi Partai Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Fraksi Partai Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Fraksi Partai Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, Fraksi Partai Amanat Nasional 35 orang dari 48 anggota, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 35 orang dari 47 anggota. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 27 orang dari 47 anggota, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 20 orang dari 39 anggota. Fraksi Partai Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Fraksi Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PAN (Kuswianto): "...tentunya kita bersama-sama akan lebih bijak akan lebih arif kalau kita lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan ini. Karena Kapolri ini nanti akan bertugas salah satunya adalah penegakan hukum. Kita sangat setuju dengan pernyataan presiden RI ketika mengangkat Kapolri pejabat negara lainnya harus betul betul hati-hati dan harus komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan diksi konotatif yaitu *pemerintahan yang bersih*. Tuturan tersebut dikatakan diksi konotatif karena tuturan tersebut mengandung makna yang tidak sebenarnya atau ada makna yang lain secara implisit. Berdasarkan KBBI bersih memiliki arti bebas dari kotoran. Namun, dalam konteks tuturan tersebut, kata *bersih* berkonotasi terhadap sesuatu yang sesuai dengan peraturan dan tidak adanya tindak kejahatan. Tuturan *pemerintahan yang bersih* berkonotasi terhadap suatu keadaan pemerintah yang jauh dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (yang seterusnya disingkat KKN). Diksi konotatif sering digunakan salah satunya pada saat anggota dewan ingin mendapatkan citra positif dari masyarakat, dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang persuasif.

1.1.3 Diksi Polisemi

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Aria Bima: "...Mohon kepada pimpinan, itu juga bisa dimasukkan bagian dari paket lobi kita untuk kira-kira apakah kita perlu mengajukan kursi tambahan itu adalah hal yang sangat dianamis..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi polisemi yaitu *kursi* dalam frasa *kursi tambahan*. Frasa *kursi*

tambahan tersebut mengandung diksi polisemi, karena terdapat kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi dengan kata yang sama. Frasa *kursi tambahan* memiliki arti sebenarnya kursi (tempat duduk) perlu adanya tambahan. Namun, dalam konteks tersebut *kursi* bukan diartikan sebagai tempat duduk melainkan jabatan atau anggota baru. Jadi *kursi tambahan* bermakna perlu adanya penambahan keanggotaan dalam jabatan tertentu. Sehingga kata *kursi* berpolisemi dengan kata *kursi* dalam arti tempat duduk.

1.1.4 Diksi Sinonimi

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri atas, PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Fraksi Partai Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Fraksi Partai Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Fraksi Partai Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, Fraksi Partai Amanat Nasional 35 orang dari 48 anggota, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 35 orang dari 47 anggota. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 27 orang dari 47 anggota, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 20 orang dari 39 anggota. Fraksi Partai Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Fraksi Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: "...komisi III DPR RI telah lebih dahulu melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa ahli dan meminta saran serta masukan terhadap calon pengganti pimpinan KPK yang diusulkan oleh presiden dan apabila pimpinan KPK yang diusulkan tersebut digabungkan dengan pemilihan calon pimpinan KPK lainnya yang akan

berakhir pada masa jabatan pada tahun 2015 sehingga pemilihan dan penetapan dilaksanakan dan dilakukan terhadap 5 calon KPK secara bersamaan. Selain dengan para pakar bagaimana dengan hal tersebut komisi III juga meminta sara dan masukan kepada penengak hukum lainnya diberbagai daerah dan ketiga pada hari ke 26 november 2014 komisi III melaksanakan rapat pleno komisi III dalam rangka mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi fraksi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kata yang menunjukkan diksi sinonimi yaitu *ahli* bersinonimi *pakar*, *kalayakan* bersinonimi dengan *kepatutan*. Diksi tersebut dikatakan bersinonimi karena diksi tersebut menunjukkan kata yang memiliki makna yang sama. Sinonimi yang pertama yaitu *ahli* dan *pakar*. Berdasarkan KBBI *ahli* memiliki arti orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu. Sedangkan *pakar* memiliki arti orang yang ahli atau spesialis. Kata *ahli* dan *pakar* memiliki makna yang sama yaitu sama-sama orang yang ahli dibidangnya. Jadi diksi *ahli* dan *pakar* merupakan bentuk sinonimi. Sinonimi yang kedua yaitu *kepatutan* dan *kelayakan*. Berdasarkan KBBI *kelayakan* memiliki arti perihal layak (patut, pantas), kepantasan, dan kepatutan terhadap sesuatu. Sedangkan *kepatutan* memiliki arti baik, layak, dan pantas. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu pantas, patut, dan sesuai dengan hal yang baik. Jadi diksi *kelayakan* dan *kepatutan* merupakan bentuk sinonimi.

1.2 Gaya bahasa

Gaya bahasa yang ditemukan dalam Sidang paripurna DPR RI yaitu gaya bahasa eufemisme, erotesis, koreksi, oksimoron, resmi, klimaks, repetisi, personifikasi, dan sindiran. Penggunaan gaya bahasa anggota dewan dapat menunjukkan bagaimana Sidang

Paripurna DPR RI. Penggunaan gaya bahasa eufemisme menunjukkan bahwa anggota dewan dalam berpendapat ada maksud dan tujuan yang disembunyikan atau disamarkan. Penggunaan gaya bahasa erotesis menunjukkan bahwa anggota dewan dalam berpendapat selalu meyakinkan pendengarnya. Penggunaan gaya bahasa koreksi menunjukkan bahwa anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan menunjukkan ketidaktegasan. Penggunaan gaya bahasa oksimoron menunjukkan bahwa bahasa anggota dewan berbelit-belit yang sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan lawan bicara. Penggunaan gaya bahasa resmi menunjukkan bahwa Sidang Paripurna adalah forum resmi. Penggunaan gaya bahasa klimaks menunjukkan bahwa penyampaian pemikiran anggota dewan runtut. Penggunaan gaya bahasa repetisi menunjukkan bahwa anggota dewan menggunakan bahasa menekan agar dapat dipercaya. Penggunaan gaya bahasa personifikasi menunjukkan bahwa adanya bahasa kiasan yang digunakan pada forum resmi. Penggunaan gaya bahasa sindiran menunjukkan anggota dewan berani terang-terangan untuk melawan lawan politiknya dengan gaya menyindir. Dari sembilan gaya bahasa yang ditemukan gaya bahasa eufemisme dan sindiran yang banyak digunakan, berikut contoh analisisnya.

1.2.1 Gaya bahasa Eufemisme

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 01.59–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB (Abdul Kadir): “Ibu tolong didengarkanassalamualaikum wr.wb. tadi pada forum lobi kami dari PKB meminta dengan hormat kepada seluruh fraksi agar ini dapat ditunda sampai jam 10 pagi ini dengan banyak pertimbangan saya kira (sebagian menyuarakan kata lanjut) dengarkan saya kira keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan.

keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu *keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, menunjukkan DPR yang bermartabat dan punya marwah di depan rakyat kita*. Tuturan tersebut dituturkan oleh Abdul Kadir dari Fraksi PKB yang ditujukan kepada semua peserta Sidang Paripurna. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa eufemisme karena tuturan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan dan maksud dibalik tuturan tersebut. Tuturan tersebut digunakan untuk meyakinkan peserta sidang yang lain, agar setuju untuk menunda sidang sampai pukul 10 pagi keesokan harinya. Sehingga Fraksi PKB mengutarakan *agar sebaiknya keputusan yang diambil oleh DPR adalah keputusan yang elegan, bermartabat, dan punya marwah*. Fraksi PKB berusaha untuk menyelubungi kepentingannya dengan menggunakan bahasa propaganda agar peserta sidang mulai berpikir bahwa persidangan seharusnya *mengambil keputusan yang elegan, bermartabat, dan punya marwah* dan dapat mengundurkan persidangan hingga besok. Tuturan tersebut menunjukkan adanya ungkapan yang samar dan berputar-putar serta untuk menyelubungi kepentingannya dengan dalih meyakinkan masyarakat yang mendengar dan peserta sidang.

1.2.2 Gaya bahasa Sindiran

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Partai Gerindra? perpanjang. Demokrat? perpanjang, Partai Amanat

Nasional? perpanjang, dengerin atuh tuh, Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada. Ada tidak? tidak ada. Partai Keadilan Sejahtera? Setuju. Tuh dengerin tuh, partai persatuan pembangunan? setuju. Partai Nasional Demokrat? ada? Nasdem?”

Anggota : “Tidak setuju”

PS (Popong): “Tidak ada? Tidak setuju, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a(semua bersorak). Partai Hanura? Partai Hanura? Baik. Jadi menurut catatan yang ada pada saya apakah ini dilanjutkan apa tidak. Diperpanjang atau tidak menurut catatan pada saya adalah dilanjutkan. Nanti, nanti persoalan yang lain tu nanti. Sekarang ini hanya diperpanjang atau tidak sekarang jumlahnya sudah lebih banyak (tiba-tiba mengetok 1 kali) diperpanjang.”

Anggota : “Tidak tidak tidak.”

PS (Popong): “Baik saya lanjutkan agendanya, kalau ada yang mau nambah agenda nanti. Agendanya yang ketiga. Eh yang kedua. Agenda yang kedua adalah agenda yang kedua.”

Anggota : “Interupsi”

PS (Popong): “Apa yang harus diinterupsi, kalau sudah hanya ada menambah waktu. Nanti kalau sudah selesai.”

Anggota : “Jangan bercanda memimpin rapat ibu”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *tuh dengerin tuh, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a, jangan bercanda memimpin rapat ibu*. Pada kalimat pertama *tuh dengerin tuh* merupakan kalimat yang diucapkan oleh Pimpinan Sidang (yang seterusnya disingkat PS) untuk fraksi yang menyatakan tidak setuju bahwa rapat ini tidak dilanjutkan. Kalimat tersebut merupakan bentuk sindiran agar mereka yang tidak setuju mendengarkan fraksi yang setuju. Kalimat tersebut juga mengesankan PS memihak kepada fraksi yang setuju. Terbukti dengan kalimat selanjutnya yaitu *biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a*. Kalimat tersebut bermakna bahwa tidak masalah ada fraksi yang tidak setuju,

karena fraksi yang menyatakan tidak setuju baru satu. Kalimat tersebut mengandung makna sindiran kepada fraksi yang tidak setuju, PS beranggapan bahwa tidak masalah terdapat fraksi yang tidak setuju, karena jumlah fraksi yang menyatakan setuju lebih banyak.

Selanjutnya pada kalimat *jangan bercanda ibu memimpin rapat*, kalimat tersebut menggambarkan sindiran yang lumayan keras yaitu sinisme. *Jangan bercanda ibu memimpin rapat* merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh anggota kepada PS. Tingkah laku PS yang selalu salah dalam menyebutkan sesuatu, salah satunya dalam penyebutan agenda. Misalnya dalam kalimat *agendanya yang ketiga eh yang kedua*. Selain itu, PS selalu memakai bahasa daerah disela-sela dalam memimpin dan penunjukkan sikap bahwa PS memihak pihak yang setuju dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disebutkan sebelumnya. Perilaku PS yang seperti itu, membuat anggota sampai mengutarakan pernyataan *jangan bercanda ibu memimpin rapat*. Pernyataan tersebut mengandung sinisme kepada PS.

1.3 Maksud dan Tujuan Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa Dengan Analisis Wacana Kritis

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): Partai Gerindra? perpanjang Demokrat? perpanjang, Partai Amanah Nasional? perpanjang, dengerin atuh tuh, Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Partai Keadilan Sejahtera? Setuju. Tuh dengerin tuh, Partai Persatuan Pembangunan? setuju. Partai Nasional Demokrat? ada? Nasdem?

Anggota : Tidak setuju

PS (Popong): Tidak ada? Tidak setuju, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a (semua bersorak). Partai

hanura? Partai Hanura? Baik. Jadi menurut catatan yang ada pada saya apakah ini dilanjutkan apa tidak. Diperpanjang atau tidak menurut catatan pada saya adalah dilanjutkan. Nanti, nanti persoalan yang lain tu nanti. Sekarang ini hanya diperpanjang atau tidak sekarang jumlahnya sudah lebih banya (tiba-tiba mengetok 1 kali) diperpanjang.

PS adalah posisi yang strategis dalam hal mengusai, karena PS lah yang mengatur jalannya persidangan. PS dapat memilih mana yang dapat didahulukan dan mana yang ditinggalkan. Popong adalah PS pertama setelah DPR periode 2014–2019 terbentuk. Popong merupakan anggota dewan tertua pada periode ini. Dilihat dari dialek yang dipakai saat berbicara, Popong berasal dari Jawa Barat yaitu kental dengan bahasa Sunda. Kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan identitasnya adalah *mangga, mah a, atuh* dan sejenisnya. Pengetahuan Popong mengenai politik dan bagaimana berpolitik sangat kurang, hal tersebut dapat dilihat dari cara berkomunikasi Popong. Popong hanya mengetahui mana lawan dan mana kawan.

Tabel 1 Tuturan Popong

Tuturan Popong	Partai Keadilan Sejahtera? setuju. <u>Tuh dengerin tuh</u> , PPP? setuju. Tidak ada? tidak setuju, <u>biarin ini baru satu yang tidak setuju</u> ini mah a (semua bersorak).
----------------	---

Tuturan tersebut membuktikan, Popong secara terbuka memberitahu kepada rakyat bahwa ia membela fraksi yang ingin lanjut. Pada saat terdapat fraksi yang mengatakan setuju, Popong tanpa ragu langsung menuturkan *tuh dengerin tuh*. Sedangkan, pada saat terdapat fraksi yang mengatakan tidak setuju, ia menuturkan *biarin ini baru satu yang tidak setuju*. Berdasarkan fraksi, Popong merupakan anggota dari Fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar merupakan fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (yang seterusnya disingkat KMP). Fraksi Partai Golkar setuju untuk Sidang Paripurna tersebut dilanjutkan. Popong merupakan anggota dari Fraksi Partai Golkar, sudah pasti mengikuti sikap

partainya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan dulu mata acara yang ini. Yang ketiga eh yang keempat adalah Partai Demokrat, silahkan. Tunggu lagi bicara dulu.”

PS (Popong): “...Dengan alasan-alasan yang sangat kami mengerti oleh karenaitu maka kami persilahkan kepada partai yang akan menyampaikan paket. Ah ya partai ya fraksi ah sama bae atuh.”

PS (Popong): “Kita lanjutkan karena ini mata acara sudah selesai yang menyampaikan nggak ada lagi kan? Sudah menyampaikan sesuai dengan mata acara yang ketiga. Nah karena setelah kami baca semua ternyata dari 7 pembicara itu isinya semua sama. Ada 6 yang sama 1 berbeda, maaf karena saya tidak baca, jadi sebetulnya ada 6 semuanya sama. Dengan demikian hanya ada satu paket, kalau ada satu paket apa perlu dipilih lagi?”

PS (Popong): “Baik saya lanjutkan agendanya, kalau ada yang mau nambah agenda nanti. Agendanya yang ketiga. Eh yang kedua. Agenda yang kedua adalah agenda yang kedua.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Popong selaku PS. Tuturan yang digaris bawahi tersebut merupakan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa koreksi. Selain Popong tidak bisa menyembunyikan bahwa ia mendukung fraksi yang menyatakan setuju untuk melanjutkan persidangan. Namun, Popong juga tidak memiliki ketegasan dalam memimpin persidangan. Dapat dilihat dari berbagai kesalahan pengucapan dan pemakaian istilah-istilah bahasa Sunda dengan nada bercanda apabila terdapat kesalahan. Berdasarkan Tatib

mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPR pada pasal 28 poin 2 dan 3 menyebutkan bahwa: (2) *Pimpinan Sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari Anggota yang tertua dan termuda dari Fraksi yang berbeda*; (3) *Pimpinan Sementara DPR bertugas memimpin Sidang Paripurna DPR pertama kali untuk memilih pimpinan DPR*. Dengan adanya Tatib tersebut, akan memberikan kesempatan bagus untuk Fraksi Partai Golkar, karena kader tertua yang ada di DPR periode 2014–2019 adalah dari Fraksi Partai Golkar. Sehingga fraksi-fraksi yang lain yang tergabung dalam KMP akan memiliki kekuatan lebih untuk melakukan lobi politik dengan fraksi-fraksi yang lain guna memperkuat posisi dan kekuasaan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB (Abdul Kadir): “Ibu tolong didengarkan assalamualaikum wr.wb. tadi pada forum lobi kami dari PKB meminta dengan hormat kepada seluruh fraksi, agar ini dapat ditunda sampai jam 10 pagi ini dengan banyak pertimbangan saya kira (sebagian menyuarakan kata lanjut) dengarkan saya kira keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.”

PS (Popong) : “Maaf bapak.”

PKB (Abdul Kadir) : “Sebentar sebentar ibu saya punya hak bicara tolong saya diberi kesempatan saya anggota DPR no. 55 oleh karena itu alangkah baiknya teman-teman yang tidak bersepakat, teman-teman yang tidak bersepakat diberi ruang bicara untuk menanggapi hasil lobi yang ada.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang

dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB. Tema yang disampaikan Abdul Kadir adalah usulan penundaan Sidang Paripurna hingga keesokan harinya. Dilihat dari berbagai elemen, dalam penyampaian pendapat Abdul Kadir, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi PKB. Salah satunya dilihat dari elemen kata ganti yang digunakan yaitu *kita*. Elemen kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Pemakaian kata ganti jamak *kami/kita* mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, dan menghilangkan kritik oposisi. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan komunitas antara anggota dewan tersebut dengan anggota dewan lainnya. Apa yang menjadi sikap anggota dewan tersebut seolah-olah juga menjadi sikap anggota yang lainnya. Padahal ada kemungkinan tidak semua anggota atau pendengar memiliki pendapat atau sikap seperti yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan perasaan bersama antara anggota dewan dan anggota dewan lain serta menunjukkan tidak adanya batas antara anggota dewan.

Tabel 2. Elemen Kata Ganti (1)

Kata ganti “kita”	Keputusan-keputusan yang <u>kita</u> ambil haruslah lebih elegan. Keputusan-keputusan yang <u>kita</u> ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat. Keputusan-keputusan yang <u>kita</u> ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.
-------------------	---

Gaya bahasa yang digunakan lebih mengarahkan pada gaya bahasa eufimisme. Abdul Kadir dari Fraksi PKB menggunakan ungkapan yang lembut dan samar untuk mempertahankan kepentingannya dan mempengaruhi anggota DPR yang lain untuk mendukung dirinya. Dilihat dari tata bahasa dan kohesi, perbendaharaan kata yang dipakai dan pemaknaan kata cenderung memberi gambaran Fraksi PKB tidak memihak rakyat,

tetapi memihak DPR RI agar dipandang baik dan bermartabat oleh rakyat. Hampir tidak ada diskripsi mengenai akibat yang akan terjadi untuk rakyat apabila keputusan-keputusan tersebut diambil secara tergesa-gesa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fraksi PKB memihak pada DPR RI agar DPR dianggap elegan, bermartabat, dan memiliki marwah di depan rakyat. Kemudian dilihat dari struktur pemerintahan dan koalisi, Fraksi PKB merupakan fraksi yang bukan termasuk dalam KMP. Secara historis KMP yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra telah mengusung Prabowo sebagai Presiden RI. Ternyata hasil pemilihan umum (yang seterusnya disingkat Pemilu), Prabowo gagal sebagai presiden.

Kemudian KMP sudah memiliki calon paket pimpinan DPR pada malam Sidang Paripurna pemilihan pimpinan DPR, sehingga Fraksi PKB yang tidak termasuk KMP merasa harus menunda persidangan hingga keesokan harinya, agar fraksinya dapat melakukan lobi politik. Oleh sebab itu Fraksi PKB menuturkan *teman-teman yang tidak bersepakat diberi ruang bicara untuk menanggapi hasil lobi*, Fraksi PKB berusaha untuk menunda pemilihan pimpinan DPR RI. Kemudian selain itu, menuturkan tuturan *Keputusan-keputusan DPR RI yang kita ambil haruslah lebih elegan, mencerminkan DPR yang bermartabat, menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita* untuk alasan bahwa DPR seharusnya tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa dengan menjadikan alasan seperti ini, Fraksi PKB akan dilihat oleh rakyat bahwa ia seolah-olah mendukung rakyat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB : “Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini partai kebangkitan bangsa menyatakan sikap untuk melakukan *walk out* dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih

wassalamualaikum wr.wb. PKB dengan ini menyatakan *walk out*.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Fraksi PKB. Dari awal Sidang Paripurna dimulai, tepatnya setelah Rapat Konsultasi. Kondisi ruang persidangan sudah tidak kondusif. Banyak interupsi berdatangan, hal ini disebabkan oleh PS yang kurang tegas dalam memimpin dan tidak siapnya beberapa fraksi dalam penyampaian materi paket calon. Kesimpulan bahwa PS kurang tegas sudah dijelaskan pada analisis sebelumnya yaitu PS kurang pengetahuan terhadap politik dan lebih menggunakan kosa kata yang memancing peserta sidang untuk adu pendapat. Kemudian kesimpulan kedua, permasalahan bahwa ada beberapa fraksi yang kurang siap dalam penyampaian paket calon, salah satunya adalah Fraksi PKB. Fraksi PKB yang berusaha untuk menyampaikan pendapat bahwa Sidang Paripurna ini harus ditunda sampai keesokan harinya tidak didengar. Sehingga muncul diksi *kediktatoran mayoritas* dan *walk out* dari pernyataan PKB. PKB menganggap bahwa pada Sidang Paripurna tersebut tidak berjalan adil dan terdapat *kediktatoran* dalam memimpin sidang. Dengan demikian jalan keluar menurut Fraksi PKB benar adalah dengan *walk out*. Tindakan *walk out* ini merupakan suatu bentuk pencitraan positif di mata masyarakat terhadap Fraksi PKB. Masyarakat akan berpikir bahwa fraksi yang masih dalam forum tersebut dengan suasana gaduh dan tidak adil merupakan fraksi yang hanya mementingkan kepentingan fraksinya saja. Sedangkan Fraksi PKB yang melakukan *walk out*, merupakan fraksi yang tidak seperti itu. Namun, sebenarnya di setiap tindakan politik dari setiap fraksi lakukan memiliki maksud tersendiri, dapat dilihat secara implisit

Tabel 3. Elemen Maksud

Eksplisit	Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini PKB menyatakan sikap untuk melakukan <i>walk out</i> dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak
-----------	--

	adil.
Implisit	Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini PKB menyatakan sikap untuk melakukan <i>walk out</i> dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil. Sikap <i>walk out</i> merupakan salah satu cara untuk menghindari dan tidak ada kesiapan nama paket calon pimpinan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Aria Bima PDIP: “Saya mewakili, agar tidak mengganggu, karena kita sudah tidak diberi hak untuk bicara dalam forum ini, maka bersama ini Fraksi PDIP hanya ingin menginginkan bagaimana pemilihan pimpinan ini berjalan secara lialiter, namun mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara, kita tidak diberi waktu untuk kita bicara.”

Aria Bima (PDIP): “Bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah suasana yang seperti ini yang kita inginkan, kita cerminkan kepada lembaga tinggi negara kita.”

PAN : “Berkenaan dengan surat saudara.”

Aria Bima (PDIP): “Apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Aria Bima anggota dewan dari Fraksi PDIP. Tema yang ingin disampaikan Fraksi PDIP yaitu suasana Sidang Paripurna yang sudah tidak benar. Dilihat dari berbagai elemen, dalam penyampaian pendapat Aria Bima, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi PDIP. Salah satunya dilihat dari elemen kata ganti yang digunakan yaitu *kita*. Elemen kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif.

Pemakaian kata ganti jamak *kami/kita* mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, dan menghilangkan kritik oposisi. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan komunitas antara anggota dewan tersebut dengan peserta sidang. Apa yang menjadi sikap anggota dewan tersebut seolah-olah juga menjadi sikap semua peserta sidang. Padahal ada kemungkinan tidak semua peserta sidang memiliki pendapat atau sikap seperti yang dituturkan oleh anggota dewan tersebut. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan perasaan bersama antara anggota dewan dan pendengar serta menunjukkan tidak adanya batas antara anggota dewan dengan pendengar.

Tabel 4. Elemen Kata Ganti (2)

Kata Ganti “Kita”	<p><u>Kita</u> sudah tidak diberi hak untuk bicara dalam forum ini.</p> <p>Pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara.</p> <p><u>Kita</u> tidak diberi waktu untuk kita bicara.</p> <p>Bukan suasana yang seperti ini yang <u>kita</u> inginkan.</p> <p>Apakah suasana yang seperti ini yang <u>kita</u> inginkan, <u>kita</u> cerminkan kepada lembaga tinggi negara kita.</p> <p>Apakah ini sumpah jabatan yang <u>kitabicarakan</u>, apakah seperti ini yang <u>kita</u> inginkan.</p>
-------------------	---

Selain elemen kata ganti, terdapat elemen pengingkaran yaitu di awal kalimat Fraksi PDIP berusaha meyakinkan rakyat bahwa Fraksi PDIP menginginkan Sidang Paripurna ini berjalan secara adil dan legaliter. Kemudian di akhir kalimat, Aria Bima menuturkan *namun mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara*. Kata *namun* sebagai perlawanan dari kalimat sebelumnya. Maksud dari pengingkaran tersebut adalah yang ingin disampaikan bahwa Sidang Paripurna saat itu

tidak berjalan secara adil dan ligaliter. Fraksi PDIP juga melakukan pencitraan positif terhadap dirinya, bahwa Fraksi PDIP menginginkan Sidang Paripurna berjalan secara adil. Hal ini, dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan pendukung yaitu *bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan*. Pernyataan pendukung tersebut akan memperkuat posisi Fraksi PDIP di mata rakyat, bahwa Fraksi PDIP adalah wakil rakyat yang sangat mementingkan kepentingan rakyat. Fraksi PDIP menggunakan strategi komunikasi dengan menyampaikan pesan politik tersebut. Namun, apabila dilihat dari praktik kekuasaan pada Sidang Paripurna tersebut, Fraksi PDIP kekurangan suara pendukung dari fraksi lainya. Fraksi PDIP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (yang seterusnya disingkat KIH), sedangkan posisi KIH pada Sidang Paripurna saat itu sedang terancam kalah. Pada Sidang Paripurna tersebut praktik kekuasaan tertinggi pada saat itu adalah KMP. Posisi kekuasaan tersebut yang sebenarnya menjadi dasar kenapa Fraksi PDIP dengan terang-terangan mengkritik bahwa Sidang Paripurna tersebut tidak berjalan secara adil dan legeliter.

Fraksi PDIP merupakan fraksi yang memiliki jumlah kursi terbanyak pada DPR periode 2014–2019. Namun, hal tersebut tidak memberikan pengaruh pada saat pemilihan pimpinan DPR. Berdasarkan Tatib bagian kedua paragraf 1 tata cara pemilihan pimpinan pada Pasal 28 disebutkan bahwa *calon ketua dan wakil ketua DPR diusulkan oleh Fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua DPR dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna DPR*. Dengan demikian Fraksi PDIP seharusnya dapat mengusulkan satu paket calon pimpinan DPR dan kemungkinan besar Fraksi PDIP dapat menduduki kursi pimpinan DPR, karena jumlah kursi anggota DPR terbanyak dimiliki oleh PDIP. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Fraksi PDIP yang tergabung

dalam KIH pada Sidang Paripurna tersebut, tidak memiliki kekuatan kekuasaan yang tinggi. Jadi, dengan pernyataan *bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan* bukan merupakan sikap Fraksi PDIP yang benar-benar mementingkan rakyat. Namun, karena adanya maksud tersendiri untuk kepentingan Fraksi PDIP. Setiap wacana politik yang disampaikan anggota dewan tidak semua memiliki maksud dan tujuan yang seperti di lihat dari wacana secara teks saja. Namun, konteks kekuasaan yang dimiliki anggota dewan dapat mempengaruhi pesan politik apa yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Fausi Hardianto (Hanura): “Pimpinan yang terhormat kami dari Partai Hanura, terakhir pak terakhir. Saya Fausi Hardianto dari Sumsel 1. Pimpinan minta waktu 5 menit saja. Bahwa kami dari Fraksi Partai Hanura yang pertama tidak bertanggung jawab terhadap proses pemilihan, proses pemilihan pimpinan DPR RI. Kami melihat tidak ada proses demokrasi. Kami melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar. Awal yang pertama sekali kita sidang paripurna ini semua proses tidak di dengar oleh pimpinan sidang. Oleh sebab itu kami dari Fraksi Partai Hanura menyatakan diri tidak bertanggung jawab terhadap hasil-hasil dalam proses pemilihan pimpinan DPR dan kami menyatakan diri *walk out* dari sidang paripurna ini”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Fausi Hardianto dari Fraksi Partai Hanura. Tema yang disampaikan oleh Fausi sebagai wakil Fraksi Partai Hanura adalah pernyataan *walk out* karena menurut

Fraksi Partai Hanura Sidang Paripurna pada saat itu tidak berjalan adil. Dilihat dari berbagai elemen, dalam penyampaian pendapat Fausi, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi PDIP. Salah satunya dilihat dari elemen kata ganti yang digunakan yaitu *kami*. Elemen kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Pemakaian kata ganti jamak *kami/kita* mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, dan menghilangkan kritik oposisi. Selain itu, kata ganti *kami* juga menciptakan jarak dan memisahkan antara pihak *kami* dan mereka. Pihak kami dimaksudkan untuk pihak yang bersependapat, sedangkan pihak *mereka* dimaksudkan untuk pihak yang tidak bersependapat. Kata *kami* dimaksudkan untuk fraksi-fraksi yang melakukan *walk out*, sedangkan kata *mereka* dimaksudkan untuk fraksi-fraksi yang masih terdapat dalam forum Sidang Paripurna tersebut.

Tabel 5. Elemen Kata Ganti (3)

Kata Ganti “Kami”	<p><u>Kami</u> melihat tidak ada proses demokrasi.</p> <p><u>Kami</u> melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar.</p>
-------------------	---

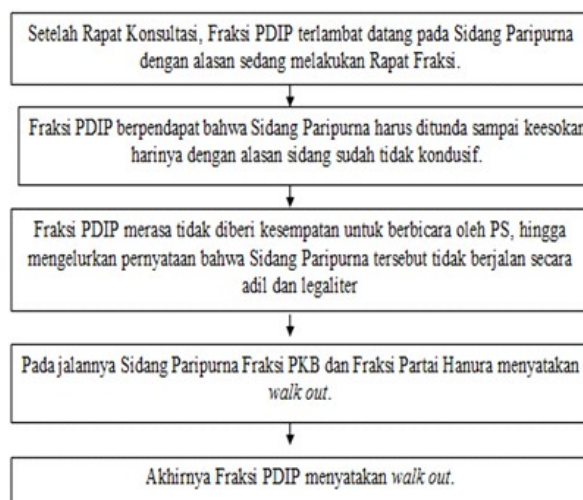
Pemakaian kata ganti *kami* dapat dimaksudkan juga bahwa *kami* benar sedangkan mereka *salah*. Fraksi Partai Hanura beranggapan bahwa sikap politik yaitu *walk out* adalah tindakan yang benar. Tindakan tersebut benar karena Fraksi Partai Hanura tidak terlibat dalam forum Sidang Paripurna yang dianggapnya tidak ada proses demokrasi. Hal itu dapat membuat citra positif terhadap Fraksi Partai Hanura karena fraksi tersebut tidak merupakan bagian dari fraksi-fraksi yang masih bertahan dalam sidang tersebut. Namun, apabila dilihat dari praktik kekuasaan pada Sidang Paripurna tersebut, Fraksi Partai Hanura yang merupakan fraksi junior belum punya kekuasaan tinggi. Jumlah kursi yang dimiliki Fraksi Partai Hanura sekitar 16 kursi. Ditambah Fraksi Partai Hanura tidak masuk dalam KMP. Dimana, pada Sidang Paripurna saat itu praktik kekuasaan tertinggi terdapat pada KMP. Hingga jalan satu-satunya untuk

menyelamatkan diri dan tetap mendapatkan pencitraan positif di mata rakyat. Fraksi Partai Hanura memanfaatkan situasi Sidang Paripurna yang lagi kacau tersebut dan menyatakan *walk out*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PDIP: “Pimpinan, bapak ibu sekalian yang saya hormati mencermati dinamika gelagat dan perkembangan yang ibu pimpin mulai rapat konsultasi tadi tentunya Fraksi PDIP yang merupakan dari partai kita ingin menjunjung kedaulatan rakyat tanpa mengurangi rasa hormat masing masing fraksi punya pertimbangan punya sikap politik oleh karena itu izinkan dari PDIP untuk tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan pada malam ini.”

Kutipan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PDIP. Tema yang disampaikan perwakilan dari Fraksi PDIP adalah sikap politik untuk menyatakan *walk out*. Pernyataan *walk out* dari fraksi-fraksi tertentu terus berdatangan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah fraksi-fraksi yang menyatakan *walk out*, cari aman atau ada strategi politik dibalik semua itu.



Gambar 1. Alur Pendapat Fraksi PDIP

Berdasarkan alur atau skema pendapat Fraksi PDIP dan situasi politik tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Fraksi PDIP masih menunggu adanya suara untuk Fraksi PDIP dari fraksi yang lain. Fraksi PDIP memiliki jumlah kursi anggota sekitar 109 kursi. Fraksi PDIP memiliki kursi terbanyak pada DPR RI periode 2014–2019. Namun, pada Sidang Paripurna tersebut Fraksi PDIP kekurangan suara dari fraksi yang lain. Fraksi PDIP sebenarnya masih menunggu fraksi-fraksi yang masih bimbang untuk masuk ke dalam koalisi misalnya PPP. Namun, karena Fraksi PPP ternyata sudah maju untuk menyampaikan nama paket calon pimpinan DPR dan tergabung dalam KMP. Maka, Fraksi PDIP sudah tidak ada harapan untuk memenangkan kursi pimpinan. Selain itu, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PKB yang sejak awal sependapat dengan Fraksi PDIP sudah melakukan *walk out* sebelumnya. Jadi, Fraksi PDIP meskipun bertahan dalam sidang tersebut sudah tidak mungkin mendapatkan kursi pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama paket calon yang merupakan gabungan dari lima fraksi yang berkoalisi yaitu terdapat Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS. Sedangkan anggota Fraksi PPP tidak masuk dalam jajaran pimpinan karena hanya lima kursi pimpinan yang dibutuhkan dan Fraksi PPP tidak memiliki kekuasaan yang terlalu tinggi dalam DPR RI. Fraksi PPP hanya ikut dalam KMP dan lobi-lobi politik yang dilakukan KMP dapat diterima oleh PPP. Jadi suatu pernyataan yang ada pada dunia politik, tidak selamanya memiliki maksud yang sama dengan wacana yang dituturkan, karena dalam dunia politik suatu partai memiliki strategi komunikasi yang berbeda. Strategi komunikasi yang dapat dilihat dari wacana Fraksi PDIP adalah Fraksi PDIP mengambil hati rakyat dengan memberi pernyataan bahwa Fraksi PDIP menjunjung kedaulatan rakyat dan bukan merupakan fraksi yang mementingkan kepentingan fraksi saja. Sehingga pada Sidang Paripurna Fraksi PDIP dengan tegas menyatakan keluar dari sidang dan dengan terang-terangan mengkritik jalannya sidang. Padahal ada maksud dibalik wacana tersebut, itulah strategi politik yang terjadi di

Indonesia.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Nasdem : “Kami dari partai pertama kali hadir di dewan yang terhormat ini. Kami duduk melihat senior senior partai kami membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini. Tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia. Apa yang telah kami sampaikan tadi pagi pada rapat konsultasi yang sebenarnya tidak sempat ditutup sebenarnya itu. Sayalah yang bertannya bagaimana dengan pengesahan tata tertib DPR ini. Itulah yang disambut oleh pimpinan ini setelah semuanya mengatakan setuju setuju tidak diagendakan terus langsung keluar. Itu realita seperti itu, kita boleh bergerak apapun, kita boleh berbuat apapun tapi tidak boleh berbohong. Sebagai politisi dengan semangat untuk membangaun bangsa ini maka kebohongan harus dijauhkkan dari diri kita sendiri. karena itu dengan cita-cita yang mulia teman-teman semua yang akan menjadi mungkin saja yang akan menjadi pimpinan lembaga ini. Ini adalah lembaga terhormat kita tentunya menempatkan orang orang terbaik kader kader bangsa terbaik ditempat ini untuk memimpin kita.”

Nasdem : “Karena itu menurut kami sangat tidak adil dalam menjalankan tatacara Tatib seperti ini, dari pasal pasal yang kita baca bagaimana memilih manusia manusia dengan cara paket macam barang saja ini, jadi ini yang keliru.”(Anggota berteriak turun turun)

PS (Popong): “Tapi pak pak pak.”

Nasdem : “Adanya cacat dalam pengurusan prosedural mengurus Tatib

ini, oleh karena itu dari Fraksi Partai Nasdem, sebagai ketua fraksi partai nasdem sangat terharu dengan kondisi demokrasi bangsa hari ini.”

Nasdem : “Untuk itu kami akan keluar dari rapat ini.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi Nasdem. Tema yang disampaikan perwakilan dari Fraksi Partai Nasdem adalah pernyataan *walk out* karena Sidang Paripurna tersebut sudah tidak adil. Fraksi Partai Nasdem merupakan partai baru dalam dunia politik. Maka, dalam pernyataan Fraksi Partai Nasdem menyebut senior dan junior. Dengan semua yang disampaikan Fraksi Partai Nasdem adalah suatu bentuk strategi politik. Fraksi Partai Nasdem yang dianggap masih junior menuturkan *kami duduk melihat senior senior partai kami membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini*. Pernyataan tersebut merupakan pesan politik yang disampaikan kepada rakyat bahwa Nasdem yang masih junior dan belum mengetahui banyak mengenai politik Indonesia dan beranggapan bahwa senior-senior yang sudah banyak pengalaman mencederai jalannya demokrasi Indonesia. Pesan politik tersebut digunakan untuk mendapatkan pencitraan positif dari rakyat terhadap Fraksi Partai Nasdem. Dilihat dari praktik kekuasaannya, Fraksi Partai Nasdem tidak memiliki kekuasaan yang tinggi. Fraksi Partai Nasdem hanya memiliki 35 kursi pada DPR. Fraksi Partai Nasdem tidak tergabung dalam KMP. Setelah melihat Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDIP *walk out*. Akhirnya Fraksi Partai Nasdem mengambil langkah politik untuk melakukan *walk out* juga, karena fraksi yang masih bertahan dalam ruangan tersebut sudah memiliki satu paket calon yang sama. Alasan keempat fraksi yang *walk out* sama yaitu sudah tidak adanya keadilan dan demokrasi dalam sidang tersebut. Dengan mengatasnamakan keadilan dan kedaulatan rakyat keempat fraksi tersebut salah satunya Fraksi Partai Nasdem melakukan sikap politik yaitu *walk out*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan

DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Ansori siregar (PKS): “Pimpinan saya saksi hidup bahwa ibu sudah menutup dan saya lebih dekat dari bapak yang baru itu, saya menyaksikan Ansori Siregar buk dari PKS. Saya menyaksikan ibu menutup rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong.”

PS (Popong): “Baik pak, terimakasih.”

Anggota : “Yang bohong yang keluar dari ruangan.”

Selama persidangan berlangsung Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, dan PPP tidak terlalu mengeluarkan pendapat guna menanggapi pendapat-pendapat yang menjatuhkan dari Fraksi PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem. Walaupun ada pernyataan perlawanan atau menyanggah pendapat dari fraksi yang tergabung dalam KIH tersebut, namun hanya sekedar pernyataan biasa tidak ada wacana-wacana yang menyudutkan koalisi lawan. Fraksi yang tergabung dalam KMP tersebut, hanya mengeluarkan pernyataan *setuju* secara bersama-sama ketika PS memberi pilihan untuk melanjutkan persidangan tersebut. Selain itu, terdapat juga pernyataan sindiran seperti yang dituturkan oleh anggota dari Fraksi PKS *saya menyaksikan ibu menutup rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong*. Tuturan tersebut merupakan tuturan untuk membalas sindiran yang dilakukan oleh Fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya Fraksi Partai Nasdem menuturkan bahwa yang ada di dalam ruangan persidangan adalah bohong. Kemudian pernyataan tersebut dibalas oleh Fraksi PKS dengan tuturan *saya menyaksikan ibu menutup rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong*.

Tindakan untuk perlawanan politik yang dilakukan oleh KMP hanya sebatas perlawanan ringan saja, tidak ada wacana-wacana penentang dari wacana atau pesan politik yang disampaikan oleh KIH. Sikap politik yang seperti ini, dapat menimbulkan berbagai pertanyaan, kenapa fraksi yang tergabung dalam KMP memilih untuk tidak terlalu melakukan perlawanan. Bukan berarti fraksi yang tergabung dalam KMP berlapang dada dengan sindiran-sindiran yang dilakukan oleh fraksi dari KIH. Pasti terdapat maksud dan tujuan tertentu dari sikap politik yang demikian.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa KMP merupakan koalisi yang memiliki kekuasaan tertinggi pada Sidang Paripurna tersebut. Berdasarkan Tata cara pemilihan Pimpinan DPR RI pasal 28 poin d dan e menyebutkan bahwa *(d) paket calon pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR; (e) dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, paket calon pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara.* Fraksi yang tergabung dalam KMP mengusung satu paket calon yang sama yaitu terdiri atas H. Setya Novanto, S.E. dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc. dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri Hamzah, S.E. dari Fraksi PKS.

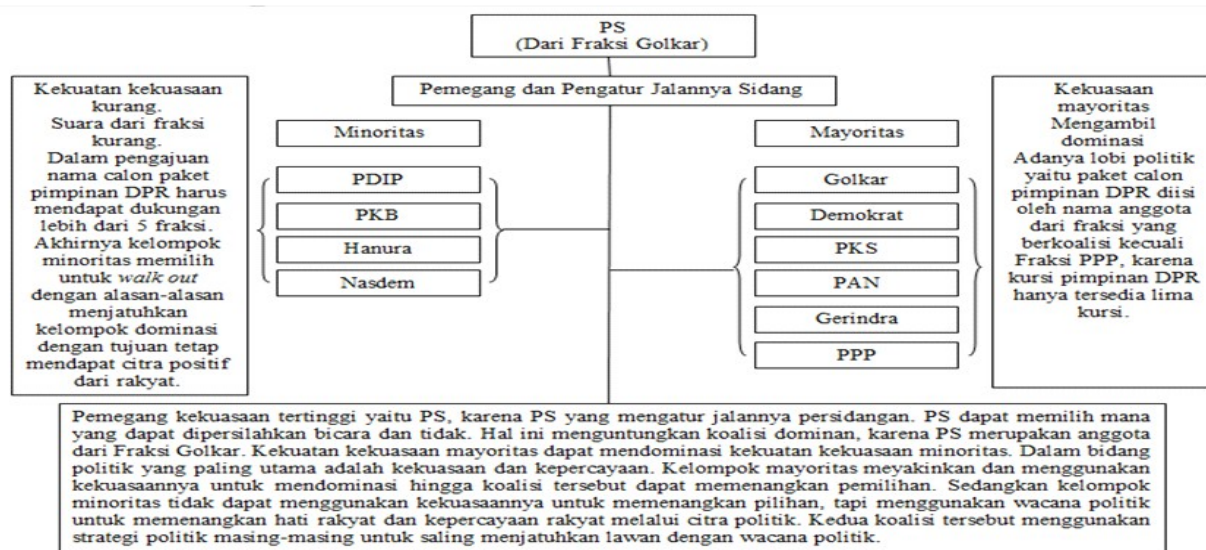
Dari paket calon yang sama, kelima fraksi yang tergabung dalam calon Pimpinan DPR tersebut sudah pasti mendukung paket calon tersebut. Ditambah dengan Fraksi PPP yang mendukung paket calon tersebut. Dengan mutlak paket calon yang diusung oleh enam fraksi akan menjadi Pimpinan DPR RI pada periode 2014–2019. Maka, keenam fraksi yang tergabung dalam KMP, memilih tidak mengambil tindakan yang merugikan dirinya. KMP lebih memilih untuk diam dan bersikap biasa dalam menanggapi pendapat-pendapat yang memojokkan dan menjatuhkan dirinya. Hal tersebut dikarenakan KMP dengan memiliki koalisi enam fraksi akan pasti menang dalam pemilihan pimpinan DPR

tersebut. Walaupun nantinya keempat fraksi tersebut tidak *walk out* hingga dilangsungkan pemungutan suara, paket calon yang diusung oleh keenam fraksi tersebut tetap menang. Berikut jumlah suara yang dimungkinkan akan diperoleh oleh KMP dan KIH.

Tabel 6. Kemungkinan Perolehan Suara Pemilihan Pimpinan DPR

No.	Nama Fraksi	KMP	KIH
1	Fraksi Partai Golkar	91	
2	Fraksi Partai Gerindra	73	
3	Fraksi Partai Demokrat	61	
4	Fraksi PAN	49	
5	Fraksi PKS	40	
6	Fraksi PPP	39	
7	Fraksi PDIP		109
8	Fraksi PKB		47
9	Fraksi Nasdem		35
10	Fraksi Hanura		16
	Jumlah	353	207

Tabel tersebut berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing fraksi yang ada di DPR. Jadi walaupun fraksi PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura tidak *walk out*, paket calon yang diusung oleh fraksi yang tergabung dalam KMP akan tetap menang. Dapat dilihat dari jumlah kursi keenam fraksi tersebut, apabila dijumlahkan memperoleh suara 353 suara. Dibanbandingkan dengan keempat fraksi yang tergabung dalam KIH hanya memperoleh suara 207 suara. Walaupun sistematis pemungutan suara adalah yang memilih anggota bukan fraksi. Namun, perlu dipahami bahwa anggota yang tergabung dalam fraksi tertentu, akan selalu mengikuti intruksi dari pimpinan partai tersebut. Keseluruhan Sidang Paripurna pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2014 dengan agenda pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014-2019, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Alur Keseluruhan Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR

Kesimpulan

Pengelompokan diksi berdasarkan jenisnya ditemukan ada empat jenis diksi yang digunakan oleh anggota DPR RI, yaitu diksi denotatif, konotatif, polisemi, dan sinonimi. Selanjutnya, ditemukan juga beberapa gaya bahasa yang digunakan dalam Sidang paripurna DPR RI yaitu gaya bahasa eufemisme, erotesis, koreksi, oksimoron, resmi, klimaks, repetisi, personifikasi, dan sindiran. Penggunaan gaya bahasa eufemisme menunjukan bahwa anggota dewan dalam penyampaian pendapatnya ada maksud dan tujuan yang disembunyikan. Penggunaan gaya bahasa erotesis dapat menunjukan bahwa anggota dewan dalam berpendapat selalu dibubuhi dengan penekanan untuk menyakinkan. Penggunaan gaya bahasa koreksi dapat menunjukan bahwa anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan menunjukan ketidaktegasan. Penggunaan gaya bahasa oksimoron dapat menunjukan bahwa bahasa anggota dewan berputar-putar dengan dalih menghargai pendapat orang lain. Penggunaan gaya bahasa resmi menunjukan bahwa Sidang Paripurna tetap merupakan forum resmi.

Penggunaan gaya bahasa klimaks menunjukan bahwa penyampaian pemikiran anggota dewan runtun. Penggunaan gaya bahasa repetisi menunjukan bahwa anggota dewan menggunakan bahasa menekan agar dapat diper-

caya. Penggunaan gaya bahasa personifikasi menunjukan bahwa adanya bahasa kiasan yang digunakan pada forum resmi. Penggunaan gaya bahasa sindiran menunjukan anggota dewan berani terang-terangan untuk melawan lawan politiknya dengan gaya menyindir.

Berdasarkan diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh anggota dewan dapat disimpulkan adanya maksud dan tujuan tersendiri dari anggota dewan. Maksud dan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) kepentingan-kepentingan yang diutamakan oleh anggota dewan tersebut, kebanyakan adalah kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan politik, namun mengatasnamakan kepentingan rakyat; (2) terdapat propaganda-propaganda yang melalui wacana yang diutarakan oleh setiap perwakilan fraksi; (3) adanya pencitraan dari setiap fraksi untuk dinilai mendukung rakyat; (4) adanya saling tuduh dan saling tuding dari setiap fraksi dengan gaya bahasa sindiran dengan maksud mengunggulkan kepentingan pribadi dan kelompok namun tetap mengatasnamakan kepentingan rakyat; (5) berusaha menyembunyikan kepentingan-kepentingan politik dengan gaya bahasa eufemisme; (6) anggota dewan atau fraksi yang memiliki kekuasaan tertinggi akan mendominasi keputusan.

Bahasa dan kekuasaan merupakan dua aspek yang berkaitan. Seseorang menggunakan bahasa untuk mendapatkan kekuasaan. Melalui bahasa-bahasa persuasif dan propaganda untuk mempengaruhi dan membuat opini publik, seseorang menciptakan kekuasaan. Namun, orang yang memiliki kekuasaan juga dapat mempengaruhi bahasa. Dengan nama kuasa, seseorang dengan mudah mempengaruhi massa untuk mengikuti dan menggunakan bahasa tersebut.

Daftar Pustaka

- Cangara. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Keraf, Gorys. 1996. *Diksi dan Gaya Bahasa Komposisi Lanjutan I*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Iriantara dan Malik. 1994. *Komunikasi Persuasif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shoelhi, Mohammad. 2012. *Propaganda dalam Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.